

KEPERANTARAAN PASAR



➤ BENTUK

Keperantaraan Pasar dalam konteks pengembangan ekonomi lokal dan percepatan penurunan kemiskinan merupakan pendekatan kolaborasi peran para pihak sebagai upaya menciptakan dan mengembangkan usaha secara lebih berkeadilan dan berkesinambungan.

Tujuan dari pendekatan keperantaraan ini di antaranya adalah: (1) Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, (2) Meningkatkan peran serta para pihak dalam memberdayakan masyarakat miskin, (3) Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan berkesinambungan, (4) Memberikan harga/tingkat upah yang layak dan bersaing, (5) Mendorong berkembangnya perekonomian lokal, (6) Menyebarluaskan pengalaman yang baik.

Selain itu pendekatan keperantaraan pasar pada dasarnya lebih dari sekedar percaloan/*brokering/middleman*, namun lebih luas cakupannya dalam mengedepankan jejaring kerja, kepedulian para pihak untuk meningkatkan nilai tambah barang/jasa produsen skala mikro agar berkembang dan berkelanjutan, bagian dari mekanisme pasar yang berlangsung di berbagai sektor dan beragam intervensi sesuai kebutuhan dan dinamika pasar.

➤ LATAR BELAKANG

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian besar dari Pemerintah dan berbagai pihak. Berdasarkan publikasi BPS terakhir, kemiskinan di perdesaan mencapai 13,20% sedangkan kemiskinan perkotaan di level 7,02%. Selain itu, kesempatan penduduk di perdesaan untuk meningkatkan pendapatannya relatif terbatas, dibandingkan penduduk di wilayah perkotaan dimana kesempatan ekonominya lebih besar sehingga sangat memungkinkan meningkat kesejahteraannya/ pendapatannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk miskin Indonesia masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil yang masih bergerak di sektor informal dan berbasis di perdesaan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013 terdapat 57,8 Juta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan 99,9% dari total usaha di Indonesia, dan UMK tersebut menyerap 93,6% tenaga kerja serta berkontribusi sebesar 46,6% untuk PDB. Namun UMK tersebut banyak mengalami kendala diantaranya: (1) Hampir 90% usaha masyarakat berskala kecil, hanya menguasai aset tidak lebih dari 5%; (2) Pemberdayaan UKM stagnan menghadapi persoalan-persoalan pelik, seperti: akses pasar dan kebergantungan tengkulak, informasi asimetris, permodalan, serta (3) belum dioptimalkannya potensi (alam dan manusia) di wilayah perdesaan untuk peningkatan kesejahteraan.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin sudah banyak dan sejak lama dilakukan baik oleh pemerintah, swasta dan lembaga non-pemerintah. Program-program tersebut memberikan berbagai dukungan baik berupa pelatihan, peralatan, akses permodalan dan lain sebagainya. Program-program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah tersebar di berbagai kementerian. Sebagai contoh Kementerian Desa mengimplementasikan program PKKPM, dan Prukades, Kementerian Sosial melaksanakan Program KUBE-PKH, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Sekaya Maritim, Kementerian Tenaga Kerja melaksanakan Program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan, dan Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan bagi Usaha Mikro. Ketersebaran program tersebut juga terjadi di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintah daerah.

Namun demikian kisah sukses pemberdayaan ekonomi local dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih sangat terbatas. Kesuksesan di satu daerah juga mengalami tantangan keberlanjutannya dan replikasi ke daerah-daerah lain. Selain belum terintegrasinya program-program tersebut, tantangan terbesar lainnya yaitu dukungan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh UMK. Beberapa indikasi terkait hal ini antara lain: kesulitan dalam penyaluran permodalan seperti KUR, banyak ditemukan bantuan sarana prasarana produksi di kelompok ekonomi masyarakat miskin yang terbengkalai.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini lewat teknologi informasi membawa peluang yang besar bagi usaha masyarakat miskin, yaitu: (i) Perubahan pola konsumsi terhadap makanan yang bernilai tinggi menciptakan peluang baru bagi petani dan usaha-usaha pertanian, (ii) Perubahan tren bisnis dalam merespon dinamika global yang demikian cepat dan meluas yang merubah model bisnis yang menguntungkan, proses bisnis lebih efisien, tawaran produk sesuai permintaan, sistem logistik yang melewati batas benua dan negara, (iii) peluang di sektor off farm, seperti pariwisata perdesaan maupun olahan produk-produk lokal perdesaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Bappenas sebagai koordinator program dan kegiatan pengembangan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan dibawah payung pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) dengan dukungan KOMPAK sedang mencari model-model yang dapat direplikasi dan untuk menjadi masukan perbaikan pendekatan P2B yang sudah ada. Model yang sedang diujicobakan di 2 Kabupaten yaitu Pacitan dan Lombok Utara disebut model keberantaraan pasar (Market Linkage) dan dalam waktu yang relatif singkat model ini memberikan indikasi hasil yang cukup positif.

➤ PIHAK TERLIBAT

Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten, Program KOMPAK, Usaha Rintisan (*Start up* Bisnis) dan UMKM lokal setempat.

➤ PROSES

Secara umum tahapan yang dilaksanakan pada proses Keberantaraan Pasar terdiri dari tiga tahapan utama: Riset, Perancangan Bersama (Urun Ide) dan Implementasi.

- **Riset** bertujuan untuk mengidentifikasi sektor/komoditas unggulan dan potensial di Kabupaten dengan menggunakan pendekatan kawasan, pelaku usaha mikro yang dikelola dan/atau melibatkan masyarakat miskin, program-program yang ada, pelaku pasar potensial, serta permasalahan yang dihadapi.
- **Perancangan Bersama (Urun Ide)** bertujuan untuk menghasilkan ide/solusi secara cepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.
- **Implementasi** untuk mengujicobakan ide/solusi yang dihasilkan. Apabila tidak efektif maka harus dicari dan dicoba ide/solusi lain.
- Pendekatan keberantaraan pasar dilaksanakan dengan mencoba ide/solusi secara *iterative* untuk dilihat hasilnya dalam waktu yang relatif cepat.
- Pemahaman atas langkah-langkah dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro, mengembangkan solusi dan implementasi yang partisipatif inilah yang akan disebarluaskan, khususnya kepada pemerintah daerah dalam program



PERKEMBANGAN TERKINI

Sampai dengan Juni 2018, ujicoba yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lombok Utara dimana sektor dan komoditas yang mendapatkan intervensi dari pendekatan Keperantaraan Pasar diantaranya adalah tepung mokaf dan olahan jahu untuk Kabupaten Pacitan dan pengembangan 2 desa wisata untuk Kabupaten Lombok Utara.

Dalam ujicoba yang dilakukan dalam periode 6 bulan, terdapat indikasi positif atas produktifitas usaha dan peningkatan penjualan. Berikut adalah peta perubahan kelompok Mokaf Bogati.



➤ PROSES REPLIKASI

Setelah Pendekatan Keperantaraan Pasar diujicobakan di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil yang menjanjikan, pendekatan ini dengan dukungan Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan diperluas skala ujicobanya di Kabupaten-Kabupaten lainnya dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam kerangka pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan nilai tambah serta daya saing bagi Kabupaten-Kabupaten yang mempunyai komitmen untuk kemajuan daerahnya.

Pada tingkat kabupaten pendekatan keperantaraan ini sedang diperluas skalanya pada komoditas-komoditas lainnya.

➤ TANTANGAN/ KENDALA

- Pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan khususnya di daerah harus berpartisipasi secara aktif dalam proses penentuan komoditas unggulan, pemetaan permasalahan, pemetaan potensi pasar serta perancangan bersama pengembangan ide bisnis yang akan diimplementasikan bersama oleh pelaku ekonomi lokal baik pemerintah daerah maupun pengusaha bisnis rintisan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta peningkatan daya saing daerah.
- Dukungan konkret baik dari aspek kebijakan, regulasi dan anggaran untuk membuat ekosistem kondusif bagi para pelaku ditingkat lokal tumbuh dan berkembang bersama dalam melaksanakan ide bisnis kolaboratif pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin produktif melalui pendekatan keperantaraan pasar.

SEBELUM



Kelompok Mokaf Bogati

(dikelola oleh Ibu-Ibu Desa Ketjo)

- ▶ Memproduksi tepung singkong yang dimodifikasi
- ▶ Penjualan rata-rata per bulan (April 17 – Januari 2018): 28,8 kg, Rp346.500
- ▶ Pasar tidak pasti!

SESUDAH



- ▶ Target market jelas
- ▶ Perbaikan dalam kemasan dan higienitas produk
- ▶ Variasi produk (*cookies*)
- ▶ Anggota bertambah
- ▶ Percaya diri untuk melakukan *event* promosi
- ▶ Perluasan pasar ke Yogyakarta, Solo, Pasuruan, dan Surabaya
- ▶ Penjualan melalui Tokopedia, Instagram, *influencer* medsos, dan Pacitan Mall